

Analisis Krisis Komunikasi dalam Konflik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama *versus* Partai Kebangkitan Bangsa

Alamsyah ¹, Misnan ², Agus Hitopa Sukma ³, Iswahyu Pranawukir ^{4*}

^{1,2,3,4*} Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

article info

Article history:

Received 27 July 2025

Received in revised form
20 December 2025

Accepted 10 January 2026

Available online July 2026.

Keywords:

Communication Crisis; PBNU;
PKB; Critical Discourse
Analysis; Message
Construction.

abstract

This study examines the communication crisis in the conflict between the Nahdlatul Ulama Executive Board (PBNU) and the National Awakening Party (PKB) using Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) approach. The research object consists of the message constructions of each party as represented in mainstream media publications and official releases, including the Vice President's statement (01 August 2024, wapresri.go.id), Kompas articles (07 and 25 August 2024), and detikBali (11 August 2024). These secondary data sources were analyzed to understand how PBNU and PKB shape, assert, and maintain their respective discourses during the escalation of the conflict. The analysis reveals that PBNU frames its messages through a moral-cultural lens, emphasizing the organization's role in safeguarding religious values and positioning the conflict as an internal matter requiring rectification. Conversely, PKB employs a political legitimacy frame, asserting the party's independence, rejecting external intervention, and emphasizing a professional political agenda. The divergence in message constructions generates communication asynchrony, potentially reinforcing organizational polarization and public perception disparities. The study underscores that critical discourse analysis of media publications offers profound insights into inter-institutional communication crises and highlights the importance of strategic message management in mitigating conflict.

abstract

Penelitian ini menganalisis krisis komunikasi dalam konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough. Objek penelitian adalah konstruksi pesan masing-masing pihak sebagaimana termuat dalam publikasi media arus utama dan rilis resmi, termasuk pernyataan Wakil Presiden (01 Agustus 2024, wapresri.go.id), artikel Kompas (07 Agustus 2024), detikBali (11 Agustus 2024), serta Kompas (25 Agustus 2024). Data sekunder ini dianalisis untuk memahami bagaimana PBNU dan PKB membentuk, menegaskan, dan mempertahankan wacana mereka masing-masing selama eskalasi konflik. Hasil analisis menunjukkan bahwa PBNU membangun pesan dengan bingkai moral-kultural, menekankan peran ormas dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, dan memposisikan konflik sebagai urusan internal yang harus diluruskan. Sebaliknya, PKB menggunakan bingkai legitimasi politik, menegaskan independensi partai dan menolak intervensi eksternal, serta menekankan agenda politik yang profesional. Perbedaan konstruksi pesan ini memunculkan ketidaksinkronan komunikasi, yang berpotensi memperkuat polarisasi organisasi dan persepsi publik. Penelitian menegaskan bahwa analisis wacana kritis terhadap publikasi media memungkinkan pemahaman mendalam mengenai krisis komunikasi lintas-institusi dan pentingnya manajemen pesan strategis untuk meredam konflik.

Corresponding Author. Email: prana1enator@gmail.com ^{4}.

1. Pendahuluan

Relasi antara partai politik berbasis Islam dan organisasi kemasyarakatan Islam telah lama membentuk dinamika politik dan kehidupan sosial di Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang berkembang sejak awal abad ke-20, berfungsi sebagai wadah pendidikan, layanan sosial, dan dakwah. Di luar fungsi keagamaan, otoritas simbolik dan jejaring sosial kedua organisasi turut memengaruhi orientasi politik pengikutnya, terutama ketika pilihan elektoral dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral kolektif (Wasisto et al., 2022). Perubahan politik pasca-Reformasi 1998 memperluas ruang kompetisi partai, termasuk bagi partai-partai yang mengafirmasi identitas Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai-partai tersebut beroperasi melalui mekanisme elektoral dan institusi formal negara. Pada saat yang sama, ormas menjadi sumber dukungan sosial sekaligus rujukan normatif. Hubungan keduanya tidak pernah sepenuhnya linear: ormas dapat memberi legitimasi dan basis mobilisasi, sedangkan partai berkepentingan menjaga kedaulatan organisasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan agenda politik (Daulay et al., 2023).

Dalam praktik demokrasi, ormas kerap menjalankan fungsi kontrol sosial: mengingatkan standar etik, menjadi penengah ketika terjadi perselisihan, serta memberi penilaian terhadap perilaku elite politik yang dianggap menyimpang dari norma keagamaan. Partai, sebaliknya, menyalurkan kepentingan konstituen melalui legislasi, perumusan kebijakan, dan kerja representasi di parlemen. Persinggungan peran tersebut dapat menjadi produktif, tetapi juga mudah berubah menjadi friksi ketika klaim kewenangan saling bertabrakan misalnya saat ormas menilai perlu melakukan koreksi, sementara partai memaknainya sebagai upaya mengendalikan keputusan internal. Media memperkuat tarikan itu dengan mengedarkan pernyataan, memilih kutipan tertentu, dan menempatkan konflik sebagai konsumsi publik (Natasari & Rosalita, 2022). Secara normatif, PBNU dapat dipahami sebagai otoritas keagamaan yang diharapkan menjaga etika publik, merawat kohesi sosial, dan mengelola perbedaan di lingkungan warganya. Pada saat yang sama, PKB sebagai partai

politik memiliki mandat untuk bekerja melalui prosedur organisasi dan mekanisme demokrasi, sehingga kemandirian partai menjadi prinsip operasional yang sulit dinegosiasikan. Ketika kedua institusi memiliki ikatan historis, ekspektasi publik sering meningkat: sebagian menuntut keselarasan sikap, sebagian lain menuntut batas tegas antara pembinaan moral dan urusan kepartaian (Muhammad, 2023). Publikasi media pada Agustus 2024 memperlihatkan pesan PBNU dan PKB bergerak ke arah yang berbeda. PBNU cenderung memakai bingkai moral-kultural dengan menempatkan perselisihan sebagai urusan internal NU yang perlu penertiban, termasuk penegasan narasi sejarah. PKB menonjolkan bingkai legitimasi politik dengan menegaskan otonomi partai dan penolakan atas campur tangan pihak luar. Perbedaan arah pesan tersebut tidak berhenti sebagai silang pendapat; ia berpotensi memecah penerimaan publik, memperlebar jarak antarkelompok pendukung, dan menguatkan polarisasi di kalangan warga Nahdliyin serta basis pemilih PKB. PBNU merupakan struktur kepengurusan pusat NU yang berdiri sejak 1926 dan dikenal memiliki pengaruh luas hingga tingkat lokal. Otoritasnya bertumpu pada legitimasi sosial-keagamaan dan peran historis NU dalam ruang publik.

PKB lahir pada 1998 dan sejak awal diasosiasikan dengan basis sosial Nahdliyin, meskipun secara organisatoris berdiri sebagai partai yang tunduk pada aturan kepartaian dan kebutuhan kompetisi elektoral. Dua sumber legitimasi moral-kultural dan prosedural-politik sering berjalan beriringan, namun dapat berhadapan-hadapan ketika definisi “pembinaan” dan “intervensi” diperdebatkan. Krisis komunikasi muncul ketika pesan kedua pihak tidak saling menguatkan, melainkan memproduksi tafsir yang berseberangan dan menyulitkan publik membangun pemahaman yang stabil. Pada titik tersebut, media arus utama berfungsi sebagai ruang sirkulasi klaim dan pembentukan penerimaan sosial. Karena itu, analisis komunikasi tidak cukup menilai reaksi khalayak semata; perlu dibaca juga cara pesan dirumuskan, dipilih diksi dan logikanya, serta dipertahankan sebagai klaim legitimasi oleh aktor institusional (Wijayanto et al., 2022; Ayu Maulida, 2021). Kerangka teori bertumpu pada Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough yang memandang wacana sebagai praktik sosial yang terkait langsung dengan kuasa,

identitas, dan ideologi, sehingga teks tidak diperlakukan sebagai tuturan netral melainkan sebagai tindakan yang ikut membentuk tatanan sosial (Fairclough, 1995; Melinda et al., 2021). Wacana dipahami sebagai hasil dari kondisi sosial, institusional, situasional, serta budaya, sekaligus berdaya memengaruhi kondisi-kondisi tersebut (Anjayani & Hudiyono, 2023). Model Fairclough mengarahkan analisis pada tiga dimensi yang saling terkait: (1) teks, yang ditelaah melalui pilihan kosakata, sintaksis, gaya retorik, metafora, struktur kalimat, dan kohesi makna; (2) praktik wacana, yang menilai proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks—siapa berbicara, lewat media apa, bagaimana pesan diedarkan, dan siapa sasaran pembacanya; serta (3) praktik sosiokultural, yang menautkan teks dengan struktur sosial, sejarah, norma, serta relasi kuasa yang melingkupinya (Aminudin, 2023; Solihin, 2021; Wodak & Meyer, 2009 dalam Anjayani & Hudiyono, 2023). Melalui AWK, penelitian menilai bagaimana media dan institusi menggunakan bahasa untuk membangun klaim, menegosiasikan legitimasi, serta memproduksi penerimaan sosial; kerangka ini relevan bagi konflik PBNU–PKB karena perselisihan tidak hanya berkaitan dengan urusan organisasi atau kompetisi politik, melainkan juga pertarungan otoritas moral-kultural dan otoritas prosedural-politik yang diperdebatkan di ruang publik.

Perspektif kritis juga menempatkan bahasa sebagai arena politik representasi: siapa diberi posisi wajar, siapa ditempatkan sebagai pihak yang melanggar, dan bagaimana makna “sah” atau “tidak sah” dikukuhkan melalui pilihan diksi dan pola argumentasi (Pradika, 2022). Dalam garis itu, wacana dapat bekerja sebagai mekanisme hegemoni, ketika aktor yang lebih dominan mengulang dan menormalisasi penafsiran tertentu untuk menjaga otoritas serta kepentingannya (Nurhamidah et al., 2020; Btari Gaia Kaila Suryanto & Dadang Rahmat Hidayat, 2025). Kajian turut memanfaatkan gagasan wacana dalam demokrasi dan komunikasi politik: media massa berfungsi sebagai ruang persaingan penafsiran, tempat konflik identitas dan representasi diproduksi ulang, sehingga perbedaan bingkai pesan berpotensi memicu benturan tafsir dan krisis komunikasi antarorganisasi (Masrofah & Maryani, 2025). Untuk membaca dampak komunikasi terhadap penerimaan publik, penelitian juga memakai teori citra dalam komunikasi politik yang menjelaskan bagaimana organisasi mengelola reputasi melalui strategi representasi, simbol, dan pembingkai pesan; pada kasus PBNU–PKB, citra “penjaga otoritas moral” dan citra “partai otonom-profesional” bekerja beriringan dengan pertarungan wacana yang terpantul dalam pemberitaan (Rofidah, 2021).

Tabel 1. *State of the Art dan Research Gap*

Aspek	State of the Art (SOTA) Berdasarkan Jurnal	Research Gap yang Diisi Penelitian Anda
Isu Utama	Studi-studi yang ada secara luas menggunakan Analisis Framing (Entman/Pan-Kosicki) dan Analisis Wacana Kritis (Fairclough) untuk mengurai kontroversi politik (isu MK, BBM, Pilpres).	Spesialisasi Konteks Krisis: Studi yang ada belum fokus pada krisis komunikasi yang timbul dari konflik antar entitas sosio-politik-keagamaan besar di Indonesia, yaitu PBNU dan PKB, yang memiliki dimensi ideologi, kultur, dan politik praktis yang kompleks.
Fokus Analisis	Media cenderung membingkai kontroversi dengan menonjolkan konflik, kepentingan tersembunyi, inkonsistensi sikap, yang berdampak pada citra negatif/polarisasi terhadap figur/institusi yang terlibat.	Pergeseran Paradigma: Jurnal yang ada berfokus pada analisis media output (bagaimana berita dibingkai). Gapnya adalah mengintegrasikan analisis framing ini dengan perspektif Manajemen Krisis Komunikasi untuk menguji strategi response dan recovery yang dilakukan oleh PBNU dan PKB.
Metode	Model Entman dan AWK Fairclough adalah kerangka dominan dan proven dalam kasus-kasus politik di Indonesia.	Sintesis Teori: Penelitian Anda akan melakukan sintesis unik: menggabungkan AWK/Framing (analisis teks) dengan

teori Krisis Komunikasi (analisis strategi dan dampak reputasi) yang jarang digunakan bersama dalam konteks konflik organisasi politik Indonesia.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif (Tamangkeng & Maramis, 2022) dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough (Samsuri et al., 2022) untuk menelaah krisis komunikasi dalam konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). AWK dipilih karena dapat menunjukkan bahwa teks media dan pernyataan resmi institusi tidak hanya merepresentasikan peristiwa, tetapi juga membentuk makna, identitas kelembagaan, legitimasi, serta relasi kuasa dan ideologi (Launa & Lusianawati, 2020). Melalui pendekatan tersebut, penelitian menilai konstruksi pesan masing-masing pihak serta cara bahasa dan strategi retorik membangun wacana konflik antar-institusi. Objek penelitian berupa data primer yang terdiri atas pernyataan resmi institusi dan publikasi media arus utama yang berkaitan dengan konflik PBNU–PKB pada Agustus 2024, yaitu:

- 1) Rilis resmi Wakil Presiden Republik Indonesia (HB/SK–BPMI Setwapres, 1 Agustus 2024) yang memuat harapan agar PBNU dan PKB berfokus pada tugas utama masing-masing untuk mencegah eskalasi konflik (sumber: wapresri.go.id).
- 2) Artikel *Kompas* oleh Nicholas Ryan Aditya dan Bagus Santosa (7 Agustus 2024) berjudul “Soal Konflik PKB-PBNU, Jazilul Fawaid Sebut Intervensi Ormas ke Parpol adalah Penyerobotan”.
- 3) Artikel *detikBali* oleh Rizki Setyo Samudero (11 Agustus 2024) berjudul “PKB Bantah Muktamar Dipercepat Gegara Konflik dengan PBNU”.
- 4) Artikel *Kompas* oleh Alinda Hardiantoro dan Ahmad Naufal Dzulfaroh (25 Agustus 2024) berjudul “Perjalanan PKB, Lahir dari ‘Pangkuan’ PBNU, Kini Ingin Jadi Partai Independen”.

Keempat sumber tersebut dipilih karena merekam konstruksi pesan kedua institusi (PBNU dan PKB), baik melalui pernyataan resmi maupun pemberitaan

media arus utama yang mengangkat konflik. Data dihimpun melalui dokumentasi digital dengan mengunduh naskah lengkap dari laman resmi dan portal berita sesuai tanggal publikasi (diunduh pada 26 November 2025). Setiap teks lalu diorganisasi secara sistematis dalam format digital untuk memudahkan pembacaan dan pengodean. Analisis mengikuti tahapan AWK Fairclough sebagai berikut:

- 1) Analisis teks (mikro): menelaah struktur kebahasaan, meliputi kosakata, sintaksis, gaya bahasa, metafora, dan kohesi semantik. Fokus diarahkan pada diksi kunci yang memuat penilaian moral, legitimasi, atau identitas kelembagaan (Kudri & Ciptadi, 2023).
- 2) Analisis praktik wacana (meso): mengkaji proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks, termasuk aktor penyampai pesan, media yang digunakan, sasaran pembaca, serta tujuan komunikatif yang menyertai penyebaran pesan (Fitriana P et al., 2020).
- 3) Analisis praktik sosiokultural (makro): menautkan teks dengan struktur sosial, politik, dan budaya, termasuk relasi kuasa yang memengaruhi pembentukan pesan. Fokus diarahkan pada cara PBNU dan PKB merumuskan identitas, legitimasi, serta otoritas simbolik melalui wacana (Setyaningsih, 2022).

Untuk menjaga keandalan, penelitian melakukan triangulasi sumber antara media arus utama dan pernyataan resmi. Seluruh data dicatat, diarsipkan, dan dianalisis secara konsisten dengan protokol AWK yang telah dibakukan. Pemeriksaan ulang juga dilakukan terhadap tanggal publikasi serta otoritas sumber guna memastikan ketepatan informasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis wacana kritis atas pernyataan resmi dan pemberitaan media memperlihatkan perbedaan

konstruksi pesan yang tajam antara PBNU dan PKB dalam merespons konflik. Rilis Wakil Presiden (1 Agustus 2024; wapresri.go.id) menempatkan pemerintah pada posisi peredam ketegangan dengan menyerukan agar PBNU dan PKB kembali berfokus pada tugas utama masing-masing. Pernyataan tersebut menekankan stabilitas sosial dan tanggung jawab kelembagaan, tanpa merinci posisi moral maupun dasar legitimasi kedua pihak, sehingga berfungsi sebagai imbauan formal yang cenderung netral. Pemberitaan *Kompas* (7 Agustus 2024) menunjukkan PBNU membingkai perselisihan melalui sudut pandang moral-kultural, terutama ketika intervensi ormas terhadap partai diposisikan sebagai “penyerobotan” dan pelanggaran norma organisasi. Narasi tersebut menguatkan peran ormas sebagai penjaga nilai keagamaan dan etika publik, sekaligus menekankan bahwa penyelesaian seharusnya mengikuti mekanisme internal.

Penggunaan diksi seperti “penyerobotan” dan “kewenangan moral” mendukung penggambaran PBNU sebagai pihak yang merasa memiliki otoritas kultural untuk memberi penilaian atas urusan yang dianggap masih beririsan dengan NU. Sebaliknya, *detikBali* (11 Agustus 2024) dan *Kompas* (25 Agustus 2024) merekam cara PKB membangun bingkai politik-kelembagaan: menegaskan kemandirian partai, menolak campur tangan pihak luar termasuk dari PBNU serta menautkan keputusan organisasi pada aturan dan prosedur internal. PKB juga menekankan bahwa percepatan muktamar tidak terkait langsung dengan perselisihan. Diksi seperti “independen”, “profesional”, dan “mandiri” memperkuat citra PKB sebagai organisasi politik yang mengedepankan legitimasi prosedural dibandingkan legitimasi moral-kultural. Perbedaan arah pesan tersebut memunculkan ketidaksinkronan komunikasi antarinstansi. PBNU mengedepankan legitimasi moral dan kepatuhan pada norma organisasi, sedangkan PKB menekankan legitimasi politik dan kemandirian kelembagaan. Pada ranah praktik wacana (meso), media berfungsi sebagai ruang perebutan penafsiran, tempat kedua pihak berupaya mempertahankan citra masing-masing di hadapan publik. Pada ranah sosial-budaya (makro), ketegangan tersebut berkaitan dengan sejarah relasi ormas dan partai berbasis agama, perbedaan sumber otoritas, serta cara masing-masing pihak

mendefinisikan batas kewenangan. Temuan penelitian menunjukkan krisis komunikasi lintas institusi tidak semata dipicu oleh perbedaan kepentingan politik, tetapi juga oleh benturan bingkai wacana yang dipakai PBNU dan PKB. Ketidaksejajaran bingkai tersebut berpeluang memperlebar perbedaan tafsir publik dan memperkuat polarisasi penerimaan atas konflik, sehingga pembacaan melalui analisis wacana kritis dibutuhkan untuk menilai arah pesan dan risiko komunikasinya.

Analisis Teks (Tingkat Mikro)

Rilis Wakil Presiden (1 Agustus 2024; wapresri.go.id) memuat pernyataan: “To avoid escalating conflict, the Vice President hopes that PBNU and PKB will focus on their respective primary tasks.” Secara leksikal, frasa “avoid escalating conflict” menandai tujuan preventif tanpa menunjuk pihak yang dianggap penyebab masalah. Frasa “focus on their respective primary tasks” menegaskan pembagian peran dan tanggung jawab kelembagaan. Struktur kalimat yang ringkas mengesankan pesan administratif; konflik diperlakukan sebagai sesuatu yang perlu dikendalikan melalui penertiban prioritas, bukan melalui penilaian atas benar-salah salah satu pihak. Judul *Kompas* (7 Agustus 2024) “Soal Konflik PKB-PBNU, Jazilul Fawaid Sebut Intervensi Ormas ke Parpol adalah Penyerobotan” menguatkan bingkai moral-kultural melalui diksi “penyerobotan” yang berkonotasi pelanggaran batas kewenangan. Di dalam teks, PBNU diposisikan sebagai otoritas moral yang berhak menilai relasi ormas-partai. Diksi seperti “intervensi” dan “kewenangan moral” menegaskan fungsi pengawasan normatif yang dilekatkan pada PBNU. Judul *detikBali* (11 Agustus 2024) “PKB Bantah Muktamar Dipercepat Gegara Konflik dengan PBNU” menonjolkan penyangkalan (“bantah”) sebagai tindakan komunikasi defensif untuk mereduksi dugaan keterkaitan sebab-akibat. Diksi “independen” dan “profesional” membangun citra organisasi yang berorientasi prosedur, serta menekankan otonomi pengambilan keputusan. Struktur kalimat cenderung menata penjelasan melalui logika sebab-akibat untuk memisahkan isu muktamar dari perselisihan. Artikel *Kompas* (25 Agustus 2024) “Perjalanan PKB, Lahir dari ‘Pangkuan’ PBNU, Kini Ingin Jadi Partai Independen” menempatkan konflik dalam alur sejarah dan perubahan posisi. Penekanan pada kata “independen”, “profesional”, dan

“mandiri” mengarah pada narasi pendewasaan organisasi dan penguatan legitimasi kelembagaan, yang dibedakan dari klaim moral-kultural PBNU.

Pada tingkat praktik wacana, media berfungsi sebagai ruang sirkulasi klaim yang membuat pesan PBNU dan PKB berkompetisi dalam bentuk yang mudah dikonsumsi publik. Rilis Wakil Presiden bergerak sebagai pernyataan formal yang mereduksi tensi, sedangkan pemberitaan media menata konflik lewat pilihan judul, kutipan, dan penekanan tertentu. Perbedaan strategi publikasi tersebut memperlihatkan cara pesan dibangun, diedarkan, dan diterima pembaca.

Analisis Praktik Sosial-Budaya (Tingkat Makro)

Dalam relasi sosial-politik Indonesia, perselisihan PBNU–PKB mencerminkan ketegangan antara otoritas ormas berbasis agama dan kedaulatan organisasi partai berbasis agama. PBNU cenderung menegaskan peran pengawasan normatif, sedangkan PKB menekankan otonomi kelembagaan dan kerja politik berbasis prosedur. Sejarah kedekatan, distribusi kuasa simbolik, dan perebutan otoritas turut membentuk arah pesan masing-masing pihak. Perbedaan bingkai tersebut berpotensi memperkuat polarisasi penerimaan publik karena khalayak dihadapkan pada dua logika legitimasi yang saling bersaing.

Krisis Komunikasi dan Komunikasi Krisis dalam Konflik PBNU–PKB

- 1) Krisis komunikasi muncul ketika pesan antarinstansi tidak sejalan, bingkai yang dipakai berbeda, dan tafsir publik terpecah. Dalam kasus PBNU–PKB, rilis Wakil Presiden menekankan netralitas dan pembatasan eskalasi, tetapi tidak menyatukan narasi PBNU dan PKB. PBNU mengedepankan legitimasi moral–kultural (*Kompas*, 7 Agustus 2024), sedangkan PKB mengedepankan otonomi politik dan legitimasi kelembagaan (*detikBali*, 11 Agustus 2024; *Kompas*, 25 Agustus 2024). Benturan tersebut dapat memicu kebingungan publik, memperlebar perbedaan penerimaan, dan meningkatkan risiko eskalasi.
- 2) Komunikasi krisis yang berjalan tampak sebagai upaya eksternal yang bersifat preventif melalui rilis Wakil Presiden. Seruan untuk kembali pada tugas utama dapat dibaca sebagai langkah meredakan

tensi. Namun, upaya tersebut belum menyentuh koordinasi pesan antarpihak sehingga jarak narasi tetap lebar.

- 3) Relasi keduanya menunjukkan konflik bergerak dalam dua jalur: krisis komunikasi bertahan karena pesan PBNU dan PKB berjalan sendiri-sendiri, sementara komunikasi krisis muncul sebagai imbauan eksternal yang mereduksi panas konflik tanpa menyatukan definisi masalah. Tanpa koordinasi komunikasi antarinstansi, perselisihan mudah bergeser dari urusan organisasi menjadi polemik publik yang lebih luas.
 - 4) Implikasi:
 - a) Krisis komunikasi menguat saat pesan tidak selaras dan media mengamplifikasi perbedaan bingkai.
 - b) Komunikasi krisis cenderung lebih efektif bila diikuti pembatasan isu, kesepakatan titik temu narasi, dan disiplin juru bicara.
 - c) Pada kasus PBNU–PKB, langkah preventif eksternal belum cukup untuk menutup jarak pesan antarpihak.
 - 5) Temuan ringkas:
 - a) PBNU memakai bingkai moral–kultural; kata kunci: “penyerobotan”, “kewenangan moral”, “norma organisasi”.
 - b) PKB memakai bingkai politik–kelembagaan; kata kunci: “independen”, “profesional”, “mandiri”.
 - c) Media arus utama menjadi ruang persaingan penafsiran dan penguatan citra kelembagaan.
- (4) Benturan bingkai memicu ketidaksinkronan komunikasi dan membuka ruang polarisasi penerimaan publik.

Konstruksi Kekuasaan Media dan Kekuasaan Politik PBNU–PKB

1) Kekuasaan media

Media arus utama, seperti *Kompas* dan *detikBali*, memegang peran strategis dalam membentuk agenda publik dan tafsir atas konflik. Melalui pemilihan diksi, pembingkai (framing), dan penekanan narasi, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendistribusikan legitimasi simbolik. Dalam artikel *Kompas* (7 Agustus 2024), pemberitaan menempatkan PBNU sebagai otoritas moral yang mengawasi dugaan intervensi terhadap partai,

sehingga memperkuat posisi moral-kultural PBNU. Sementara itu, artikel *detikBali* (11 Agustus 2024) dan *Kompas* (25 Agustus 2024) lebih menonjolkan PKB sebagai partai yang independen dan profesional, sehingga menguatkan legitimasi kelembagaan PKB. Analisis wacana kritis menunjukkan media membangun arena kekuasaan simbolik tempat kedua institusi berkompetisi untuk menegaskan narasi masing-masing. Pilihan aspek yang ditonjolkan berpengaruh pada persepsi publik dan citra institusi. Dalam posisi tersebut, media dapat tampak nonpartisan, tetapi tetap memiliki daya pembingkai yang membentuk penerimaan publik terhadap legitimasi moral maupun politik kedua pihak.

2) Kekuasaan politik PBNU dan PKB

PBNU dan PKB memiliki sumber kekuasaan institusional yang berbeda. PBNU menekankan otoritas moral dan kultural; kekuasaan ini bersifat normatif dan simbolik, bertumpu pada legitimasi keagamaan, tradisi, serta peran ormas sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan. Bingkai moral-kultural PBNU menguatkan posisi sebagai pengawas internal dan rujukan moral publik. PKB menekankan kemandirian dan profesionalisme kelembagaan dengan mengandalkan legitimasi politik formal serta struktur kepartaian. PKB menegaskan kontrol atas agenda politik, muktamar, dan proses pengambilan keputusan internal, yang menunjukkan dominasi kewenangan dalam ranah politik praktis. Kedua bentuk kekuasaan ini berinteraksi melalui media: PBNU menguatkan otoritas normatif lewat narasi moral, sedangkan PKB menegaskan legitimasi politik dan profesionalisme melalui pesan yang menekankan otonomi organisasi.

3) Interaksi kekuasaan media dan politik

Analisis wacana kritis memperlihatkan tiga dinamika utama. Pertama, media menjadi arena legitimasi yang memfasilitasi kedua institusi menampilkan dan mempertahankan narasi masing-masing; persaingan tidak hanya berlangsung pada ranah organisasi dan politik, tetapi juga pada ranah simbolik melalui pemberitaan. Kedua, perbedaan bingkai—moral-kultural pada PBNU dan politik-kelembagaan pada PKB—memunculkan benturan tafsir di ruang publik; media dapat memperlebar

perbedaan tersebut melalui penekanan editorial pada aspek tertentu. Ketiga, konstruksi media berpengaruh pada penerimaan publik: khalayak berpotensi menangkap narasi yang tidak seragam, yang dapat memperkuat polarisasi dan memengaruhi penilaian atas legitimasi masing-masing institusi. Dalam kerangka tersebut, media dapat bertindak sebagai penguat konflik atau, pada situasi tertentu, sebagai penahan eskalasi, bergantung pada cara isu dibingkai.

Konstruksi kekuasaan dalam konflik PBNU–PKB memperlihatkan dua lapis kekuatan yang saling berhubungan: (1) kekuasaan politik institusional PBNU dan PKB yang bekerja melalui pengendalian agenda internal serta klaim legitimasi masing-masing; dan (2) kekuasaan simbolik media yang membentuk persepsi publik serta menata cara narasi institusi dibaca. Interaksi keduanya menunjukkan krisis komunikasi tidak hanya dipicu oleh perbedaan kepentingan, tetapi juga oleh persaingan pembingkai dalam pemberitaan, ketika publik memaknai konflik berdasarkan narasi yang beredar.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan konstruksi pesan yang signifikan antara PBNU dan PKB dalam merespons konflik, yang berimplikasi pada krisis komunikasi lintas institusi. PBNU cenderung menekankan bingkai moral-kultural dan legitimasi internal, sedangkan PKB menonjolkan bingkai politik serta legitimasi kelembagaan. Temuan ini selaras dengan literatur Analisis Wacana Kritis yang menegaskan bahwa teks dan praktik wacana tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk makna, mengukuhkan identitas institusional, serta mempertahankan atau menegosiasikan kekuasaan simbolik (Fairclough, 1995; Wodak & Meyer, 2009).

Dari perspektif teori citra dalam komunikasi politik, konstruksi pesan kedua pihak dapat dipahami sebagai upaya strategis untuk mengelola reputasi dan memperkuat sumber legitimasi masing-masing. PBNU membangun citra sebagai penjaga nilai moral dan otoritas kultural, sedangkan PKB menegaskan citra partai yang independen, profesional, dan berorientasi pada tata kelola kelembagaan. Hal ini sejalan dengan temuan Ardliansyah dan Sufyanto (2024) bahwa pembingkai media berpengaruh

terhadap pembentukan citra aktor maupun institusi politik. Dalam relasi ormas–partai, citra menjadi instrumen untuk memengaruhi persepsi publik, menjaga dukungan konstituen, sekaligus meningkatkan posisi tawar institusi. Pada tataran praktik wacana dan praktik sosiokultural (meso dan makro), media arus utama berfungsi sebagai arena perebutan makna dan legitimasi. Pemberitaan tidak sepenuhnya berdiri sebagai informasi netral, melainkan menjadi ruang strategis tempat masing-masing pihak menegaskan narasi, memperkuat klaim moral atau politik, dan meminimalkan dampak negatif terhadap citra institusi. Temuan ini mendukung studi Reza, Hanafi, dan Azahar (2024) serta Maulida, Soebiantoro, dan Sugiarto (2025) mengenai peran framing media dalam membentuk opini publik serta citra figur atau lembaga. Kombinasi perbedaan bingkai dan strategi komunikasi tersebut menghasilkan ketidaksinkronan pesan yang menjadi sumber utama krisis komunikasi. Ketika PBNU menonjolkan legitimasi moral, sementara PKB menekankan legitimasi politik-kelembagaan, publik berpotensi mengadopsi interpretasi yang berbeda-beda, memperkuat polarisasi persepsi, dan meningkatkan risiko eskalasi konflik. Karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya manajemen pesan yang strategis serta koordinasi komunikasi lintas institusi agar pesan yang disampaikan tidak saling menegasikan dan dapat menurunkan tensi konflik.



Gambar 1. Politik Komunikasi versus Komunikasi Politik

PKB. Pada sisi politik komunikasi, penekanan berada pada strategi, kontrol pesan, dan pembungkaman isu oleh aktor politik seperti PBNU dan PKB. Hal ini tampak, misalnya, melalui pernyataan resmi tokoh (misalnya Gus Yahya atau Cak Imin) yang disalurkan melalui media, arahan/briefing internal, serta manuver politik yang dirancang untuk memengaruhi opini publik dan mengonsolidasikan basis dukungan masing-masing. Dengan demikian, politik komunikasi dalam konflik ini terlihat sebagai upaya mengelola narasi agar citra institusi tetap positif, baik di mata publik maupun anggota organisasi. Sebaliknya, komunikasi politik menekankan proses interaksi pesan dengan publik, termasuk bagaimana pesan dipahami, dinegosiasikan, dan memunculkan respons masyarakat. Contohnya adalah cara warga NU, simpatisan PKB, dan masyarakat luas menafsirkan pemberitaan mengenai dinamika kepemimpinan serta perebutan pengaruh politik.

Pada titik ini, respons publik tidak selalu selaras dengan maksud pesan aktor, sehingga persepsi dan legitimasi politik yang terbentuk bisa berbeda dari yang diharapkan. Ketidaksinkronan persepsi publik tersebut menegaskan peran media sebagai mediator sekaligus penyaring (filter) yang dapat mengubah penekanan pesan melalui framing editorial, pilihan narasumber, penempatan isu, dan judul berita. Dalam konflik PBNU–PKB, variasi pemberitaan—baik di media arus utama maupun media yang cenderung partisan—mendorong beragam interpretasi di ruang publik. Akibatnya, legitimasi politik tidak hanya ditentukan oleh pesan resmi, melainkan juga oleh bagaimana pesan itu dikonstruksi media dan diterima khalayak. Implikasinya, bagi PBNU dan PKB, penguasaan politik komunikasi saja tidak memadai karena publik memiliki kerangka tafsirnya sendiri yang dapat menolak, mengubah, atau bahkan mengontraskan pesan resmi. Strategi yang lebih efektif perlu memadukan politik komunikasi dan komunikasi politik, yaitu membangun kontrol pesan untuk menghasilkan narasi yang koheren sekaligus memantau respons publik, melakukan klarifikasi terhadap mispersepsi, dan menguatkan keterlibatan dua arah agar krisis komunikasi tidak semakin membesar.

Gambar 1 mencerminkan interaksi yang kompleks antara aktor politik dan media dalam konflik PBNU–

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis terhadap konflik PBNU–PKB, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan bingkai wacana yang mendasar: PBNU cenderung menggunakan bingkai moral kultural dengan menekankan legitimasi internal ormas serta peran sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan, sementara PKB lebih menonjolkan bingkai politik–kelembagaan melalui penekanan pada independensi, profesionalisme, dan legitimasi formal partai. Perbedaan bingkai ini memunculkan ketidaksinkronan komunikasi dan membuka ruang polarisasi persepsi publik. Konflik tersebut lebih mencerminkan krisis komunikasi karena pesan kedua institusi tidak selaras dan tafsir publik menjadi beragam, sedangkan komunikasi krisis yang muncul dari pihak eksternal misalnya melalui rilis Wakil Presiden (1 Agustus 2024) bersifat preventif dan terbatas sehingga tidak cukup mendorong koordinasi narasi PBNU–PKB. Dalam situasi ini, media arus utama seperti *Kompas* dan *detikBali* berperan sebagai arena perebutan makna dan legitimasi simbolik; media bukan sekadar menyalurkan informasi, tetapi turut mengonstruksi citra moral PBNU dan citra profesional PKB melalui framing dan penonjolan aspek tertentu. Temuan juga menunjukkan adanya konstruksi kekuasaan yang berbeda, yakni PBNU mengandalkan kekuasaan moral-simbolik, sedangkan PKB mengandalkan kekuasaan politik-kelembagaan, dan keduanya berinteraksi dengan media untuk membangun legitimasi di mata publik.

Karena itu, krisis komunikasi berpotensi diminimalkan melalui manajemen pesan yang strategis, koordinasi internal, dan penyelarasan narasi; tanpa komunikasi yang koordinatif, konflik dapat bergeser menjadi polarisasi publik yang lebih luas. Selain itu, konflik PBNU–PKB memperlihatkan perbedaan orientasi antara komunikasi politik dan politik komunikasi: PBNU lebih menonjolkan komunikasi politik melalui penyampaian nilai dan legitimasi moral ormas kepada publik, sedangkan PKB lebih menonjolkan politik komunikasi dengan memanfaatkan pesan dan media untuk memperkuat posisi politik, independensi, serta legitimasi kelembagaan, sehingga perbedaan orientasi ini turut memperburuk ketidaksinkronan pesan. Berdasarkan

kesimpulan tersebut, disarankan agar PBNU dan PKB membangun mekanisme koordinasi komunikasi internal yang lebih efektif untuk menyelaraskan narasi, sehingga pesan yang diterima publik lebih konsisten dan tidak memicu polarisasi. Selain itu, diperlukan strategi media Bersama atau setidaknya kesepakatan narasi pada isu-isu sensitive agar informasi yang disampaikan ke ruang publik tidak saling bertentangan dan dapat menurunkan tensi konflik.

5. Daftar Pustaka

- Aminudin, A. (2023). Media sosial dan wacana penundaan Pemilu 2024 dalam perspektif Norman Fairclough. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 7(2), 57–72. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v7i2.4407>.
- Anjayani, D., & Hudiyo, Y. (2023). Analisis wacana kritis model Norman Fairclough “Kuda-kuda Prabowo hadapi Anies di Pilpres 2024” dalam rubrik politik Koran Kaltim edisi Kamis, 09 Maret 2023. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(8), 1069–1070.
- Ardiansyah, M. A., & Sufyanto. (2024). Media framing and political image: A case study of Ganjar Pranowo in the U-20 World Cup coverage on Kompas.com. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 12(2), 129–142. <https://doi.org/10.12928/channel.v12i2.989>.
- Daulay, L. T. H., & Daulay, S. T. R. (2023). *Sinergi gagasan reformasi birokrasi*. Google Books.
- Fitriana P, A., Ema, E., & Lubis, F. O. (2020). Perang tagar di ruang virtual: Diskursus politik capres pasca debat putaran kedua. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 30. <https://doi.org/10.24912/jk.v12i1.5622>.
- Kudri, P., & Ciptadi, S. G. (2023). Analisis diskursus berita komunisme Harian Kompas sebelum dan sesudah peristiwa Gerakan 30 September 1965. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(1), 96–113. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v8i1.5>.

- Launa, & Lusianawati, H. (2020). Diskursus ideologi media: Dari perspektif liberal-pluralis hingga post-strukturalis. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 1(2).
- Masrofah, M., & Maryani, E. (2025). Urgensi kritik sosial oleh selebriti dalam diskursus publik di media sosial X mengenai isu sosial dan politik. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 4(1), 79–90.
- Maulida, R. A. (2021). Implementasi teori komunikasi krisis situasional pada kasus Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui @pikobar_jabar. *Jurnal Pekommas*, 6(1), 83–93. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2021.2060109>.
- Melinda, S., Fathurohman, I., & Ristiyan. (2021). Analisis wacana kritis pada podcast “Kita yang bodoh atau sekolah yang bodoh.” *CaLLs*, 7(2), 175–184.
- Muhammad, F. (2023). Konfigurasi politik dan problem identitas menjelang Pemilihan Presiden 2024. *Vox Populi*, 6(2).
- Natasari, I. T. A., & Rosalita, D. (2022). *Bobrohnya etika dan moralitas politik di Indonesia: Opini politik kaum muda*. Google Books.
- Nurhamidah, I., Pahriyono, & Sumarlam. (2020). Analisis wacana kritis pada Stand Up Comedy Indonesia. *Haluan Sastra Budaya*, 4(2), 199–218.
- Pangidoan, J. R., Kusumawindarti, N., & Windyaningrum, R. (2024). Analisis framing pemberitaan media daring tentang citra Mahkamah Konstitusi dalam hasil gugatan batasan usia capres-cawapres. *ArtComm: Jurnal Komunikasi Dan Desain*, 7(1), 23–36. <https://doi.org/10.37278/artcomm.v7i1.784>.
- Pradika, D. A. (2022). *Analisis framing kinerja anggota legislatif dalam konten kreasi (Studi kasus pada video “DPR Musikal” di channel YouTube SkinnyIndonesian24)* [Undergraduate thesis, Universitas Lampung]. Digilib Unila. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/62922>.
- Reza, F., Hanafi, & Azahar, Y. K. (2023). Framing analysis of news coverage on the BBM price increase in online media. *Sinergi International Journal of Communication Sciences*, 1(3), 153–164. <https://doi.org/10.61194/ijcs.v1i3.261>.
- Rofidah, L. (2021). Analisis komunikasi konflik netizen dalam pemaknaan feminisme pada “Thread Bekal Buat Suami.” *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 133–149. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i2.5899>.
- Samsuri, A., Mulawarman, W. G., & Hudiyono, Y. (2022). Ideologi penggunaan istilah-istilah Covid-19 di berita online: Analisis wacana kritis model Norman Fairclough. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(3), 603–618. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i3.442>.
- Setyaningsih, D. (2022). *Analisis wacana kritis Omnibus Law di Suaramerdekasolo.com dan Solopos.com serta relevansinya sebagai materi ajar menulis artikel berita di SMA* [Thesis]. Digilib UNS. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/91292/>.
- Solihin, O. (2021). Wacana kapitalisme Omnibus Law Cipta Kerja. *KOMUNIKA*, 8(1). <https://doi.org/10.22236/komunika.v8i1.7167>
- Suryanto, B. G. K., Hidayat, D. R., & A. V. A. (2025). Analisis wacana kritis terhadap wawancara khusus Mata Najwa episode “Jokowi soal IKN, Gibran, dan adili Jokowi.” *EduTIK: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 5(5), 773.
- Tamangkeng, S. L. Y., & Maramis, J. B. (2022). Kajian pendekatan fenomenologi: Literature review. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 14–32.
- Wasisto, A., Laraswanda, J., & Lindawaty, D. S. (2022). *Peran organisasi masyarakat dalam negara*. Google Books.

- Wijayanto, W., Martini, R., & Elsitra, G. N. (2022). Kajian kritis komunikasi krisis: Belajar dari kerumitan komunikasi pemerintah menghadapi pandemi Covid-19. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 149–166. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.149-166>.
- Yunanto, F., Sy, E. N. S., & Kasanova, R. (2024). Political discourse in media space: A critical discourse perspective in Indonesia. *Journal of Human and Education (JAHÉ)*, 4(4), 325–330. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1262>.
- Zulham, Lubis, A., Priyono, D., Fauzan, Juliana, S., & Deryansyah, A. (2024). Analisis framing media dalam berita kontroversial: Studi kasus pada kasus-kasus politik atau sosial. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 9118–9126.